

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Dalam kehidupan politik, setiap individu mempunyai hak-hak politik dan peranan politiknya termasuk di dalamnya untuk turut berpartisipasi memberikan suaranya dalam suatu pemilihan. Partisipasi merupakan salah satu elemen dasar di dalam demokrasi, yang merupakan suatu proses untuk membangun interaksi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dimana menurut Robert Dahl di dalam demokrasi perwakilan partisipasi itu lebih dimaksudkan sebagai keterlibatan warga negara di dalam pemilu.<sup>1</sup>

Pemilu sebagai bagian dari demokrasi merupakan suatu mekanisme di mana rakyat berkesempatan untuk memilih pemimpinnya secara langsung yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara maksimal sebab melalui pemilu masyarakat ikut menentukan kebijakan dasar melalui program yang di tawarkan para calon pemimpinnya dalam kampanye sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi melalui pemilu, rakyat memunculkan para calon pemimpin dan menyaring para calon-calon tersebut berdasarkan nilai yang berlaku.

Dalam menentukan suatu pilihan, baik itu dalam kegiatan memilih anggota Legislatif, Presiden, Gubernur, Walikota, ataupun Bupati pada suatu pemilihan umum, tentunya terkait dengan pemahaman yang ada dalam tiap-tiap individu, pemahaman ini tidak terlepas dari adanya suatu orientasi politik yang dimiliki pemilih dalam mengikuti suatu pemilihan tersebut. Di mana orientasi politik ini merupakan tataran pemikiran individu yang tidak hanya bersifat

---

<sup>1</sup> Robert Dahl dalam Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi demokrasi Pasca Orde Baru)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hal 112-113.

kognitif, tetapi juga melibatkan cita rasa dan selera politik, harapan, dan evaluasi yang sebagian besar berasal dari pengalaman-pengalaman politik.<sup>2</sup>

Dalam suatu pemilihan umum, masyarakat sebagai titik tolak bagi pengembangan isu politik dan program kerja kandidat dalam usaha para pihak yang bersaing untuk memenangkan dukungan dan suara dari rakyat. Pemahaman yang baik terhadap pemilih perlu dilakukan guna memahami bagaimana agar memenangkan dukungan dari pemilih. Hal ini tentunya sangat berarti bagi pihak yang ikut dalam suatu pemilu untuk memahami pemilih dalam melakukan kegiatan pemilihan yang berhubungan dengan bagaimana orientasi politik pemilih terkait, karena orientasi politik itu sendiri merupakan tataran pemikiran individu yang masih bersifat abstrak yang kemudian akan nampak pada perilaku politiknya, yakni dalam hal memilih pada pemilu.

Orientasi politik sebagaimana dijelaskan Almond dan Verba sebagai budaya politik yang merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.<sup>3</sup> Budaya politik tidak lain dari pada orientasi psikologis terhadap objek sosial, dalam hal ini sistem politik kemudian mengalami internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat *cognitive, affective, dan evaluative*.<sup>4</sup>

Lebih jauh mereka menyatakan bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki terhadap obyek-obyek politiknya. Di mana obyek orientasi politik adalah berupa sistem politik secara keseluruhan, aspek-aspek input dan output, serta sejumlah pribadi sebagai aktor.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Terj. Sahat Simamora, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hal 40.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 14.

<sup>4</sup> Orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik, sedangkan orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu didalamnya. Affan Gaffar, *Politik Indonesia (Transisi Menuju Demokrasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991, hal 99-100.

<sup>5</sup> Budi Suryadi, *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006, hal 42-43.

Secara sederhana dalam konteks pemilu obyek-obyek tersebut adalah hal yang nampak pada pemilu itu sendiri serta para peserta pemilu.

Pemahaman yang diperoleh oleh masyarakat dalam memutuskan pilihan terhadap suatu kandidat tidak terlepas dari peranan sosialisasi politik yang mana sosialisasi politik juga merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara-negara manapun, di mana melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Dengan adanya sosialisasi politik akan mempengaruhi cara pandang dan penilaian atas aspek-aspek kehidupan politik seseorang. Melalui sosialisasi politik, sistem nilai, norma, dan keyakinan yang dimiliki oleh sebuah generasi dapat diturunkan kepada generasi berikutnya melalui berbagai media, seperti: keluarga, sanak-saudara, kelompok bermain, sekolah. Kemudian, setelah selesai pendidikan diteruskan melalui lingkungan kerja dan ditopang oleh media yang lain seperti: koran, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. Keluarga merupakan agen pertama yang sangat menentukan pola pembentukan nilai politik bagi seorang individu. Dengan semakin bertambahnya usia dan pengalaman, semakin bertambah pula kesempatan bagi individu untuk memperoleh sosialisasi politik yang lebih luas.<sup>7</sup>

Dalam suatu pemilihan sosialisasi politik diperlukan bagi seseorang yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff sosialisasi politik adalah sebagai proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.<sup>8</sup> Proses sosialisasi politik pun diperoleh secara sengaja maupun tidak sengaja melalui agen-agen sosialisasi tempat di mana seseorang memperoleh pengetahuan, nilai, dan sikap politik di

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 59.

<sup>7</sup> Affan Gaffar, *op.cit.*, hal 102-105.

<sup>8</sup> Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal 120.

dalam kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), yang kemudian menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik.

Penelitian ini mencoba melihat adanya pengaruh agen atau sarana sosialisasi politik terhadap orientasi politik seseorang. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa agen atau sarana diperlukan sebagai tempat di mana seseorang memperoleh pengetahuan, nilai, dan sikap politik. Adapun yang menjadi pilihan agen atau sarana sosialisasi politik meliputi sosialisasi melalui pekerjaan dan media massa.

Keberadaan media massa dan kelompok kerja sebagai agen sosialisasi politik mempunyai fungsi dan peranannya dalam membentuk orientasi politik individu. Pada masa pemilu, media massa seperti surat kabar, televisi, dan radio yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik yang menjadi alat utama dalam menjangkau publik secara luas hampir setiap hari menyajikan berita mengenai kandidat. Media massa merupakan salah satu sumber informasi politik yang penting di dalam masyarakat. Ketertarikan seseorang terhadap persoalan-persoalan politik di media massa akan turut membentuk sekaligus mempengaruhi sikap dan persepsi politiknya. Media massa bisa menyajikan informasi yang baik dan buruk mengenai suatu pasangan kandidat atau partai politik.<sup>9</sup>

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh LSI bahwa Intensitas seseorang dalam mengikuti berita sosial-politik dan pemerintahan cukup tinggi,<sup>10</sup> hal ini dapat dilihat dalam temuan datanya di mana pada umumnya pemilih lebih memilih menonton TV (75%), dari yang menonton TV itu yang menonton berita atau talk show sosial-politik lewat TV sekitar 32,5%,

---

<sup>9</sup> Lihat Fredo Permana, Perilaku Memilih Mahasiswa Universitas Andalas Dan Universitas Bung Hatta Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2005, *Skripsi*, Padang: FISIP Unand, 2007.

<sup>10</sup> Media Massa dan Sentimen Terhadap Partai Politik Menjelang Pemilu 2014, [http://www.lsi.or.id/file\\_download/56](http://www.lsi.or.id/file_download/56), diakses tanggal

yang berarti lumayan banyak. Bersamaan dengan itu yang mengikuti berita lewat TV tiap hari dalam sebulan terakhir juga cukup besar (48%). Sementara yang mendengarkan radio hanya 13%, dan dari 13% ini yang mendengarkan berita dan talk show dari 13% itu sebesar 24%. Yang membaca koran juga sedikit, yakni hanya 11%. Dari yang sedikit ini paling banyak membaca berita politik, kemudian olah raga, lalu masalah kriminal, dan ekonomi. Dengan tingkat ekspos pada TV yang begitu besar meskipun sebagian besar bukan terkait dengan isu politik, maka TV yang paling potensial mempengaruhi massa pemilih secara lebih signifikan. Surat kabar juga potensial menjadi media yang mempengaruhi sentimen pemilih bila framing tertentu dibuat karena dari pembaca koran yang sedikit itu paling banyak berhubungan dengan berita politik.

Sedangkan sosialisasi politik pada lingkungan pekerjaan akan terbentuk organisasi-organisasi formal atas dasar pekerjaan yang dapat berfungsi sebagai saluran informasi tentang masalah-masalah politik. Dengan cara ini organisasi-organisasi tersebut secara tidak langsung memberikan pengetahuan politik kepada para anggotanya.<sup>11</sup> Peran lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap nilai-nilai politik karena dapat menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan terhadap dunia politik. Di mana pekerjaan tertentu menuntut peran tertentu dari pekerjaannya.

Dalam penelitian ini sosialisasi melalui pekerjaan difokuskan kepada pekerjaan responden sebagai guru dan dosen. Di mana pekerjaan sebagai guru dan dosen merupakan profesi profesional yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jadi, pekerjaan sebagai guru dan dosen merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian berstandar mutu atau norma tertentu.

---

<sup>11</sup> Almond dan Powell dalam A. Gau Kadir, *Sosialisasi Politik Pada Masyarakat Suku Makassar di Desa Bontoala, Gowa, Sulawesi Selatan*, <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/82263-T3411-Sosialisasi%20politik-TOC.pdf>, diakses tanggal 30 Juni 2011.

Sehingga pekerjaan sebagai guru dan dosen dituntut untuk menguasai secara mendalam bahan belajar atau mata pelajaran serta cara pembelajarannya, mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, menjadi partisipan aktif masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya, serta memiliki pengetahuan dan informasi yang luas.<sup>12</sup>

Selain itu guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>13</sup> Dengan demikian peranan guru dan dosen sangat penting dalam dunia pendidikan karena selain merupakan seorang pendidik profesional yang mempunyai jenjang pendidikan tinggi, guru dan dosen juga dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterbukaan informasi yang berperan mentransfer ilmu pengetahuan ke peserta didiknya.

Sehingga agen sosialisasi politik media massa dan pekerjaan ini memiliki peranan yang penting dalam mengajarkan atau mentransmisikan pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap politik kepada seluruh anggota masyarakat khususnya guru dan dosen.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan pemilihan umumnya, di mana terdapat hal yang menarik pada pelaksanaan pemilihan umum di kota Padang, di mana dari tiap pemilu terdapat perubahan orientasi pemilih yang nampak pada pilihan pemilih yang ada pada pemilu Legislatif tahun 2004 dan pada pemilu Legislatif tahun 2009.

---

<sup>12</sup> Mudjia Rahardjo, *Profesi dan Profesionalisasi Keguruan*, <http://mudjiahardjo.com/artikel/136-pengembangan-profesionalisme-guru-2.html>, diakses tanggal 29 Juni 2011.

<sup>13</sup> Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Bab I, Pasal 1 ayat 1 dan 2.

Pada tabel dibawah ini disajikan jumlah suara untuk pemilihan keanggotaan DPRD pada Pemilihan Umum 2004<sup>14</sup> dan Pemilihan Umum 2009<sup>15</sup> menurut partai tingkat Kota Padang.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Suara Untuk Pemilihan Keanggotaan DPRD Pada Pemilihan Umum 2004 dan Pemilihan Umum 2009 Menurut Partai Tingkat Kota Padang**

NO	PARTAI	SUARA YANG DIPEROLEH DPRD TAHUN 2004	%	PARTAI	SUARA YANG DIPEROLEH DPRD TAHUN 2009	%
1	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>72.447</b>	<b>21,15%</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>118.659</b>	<b>36,22%</b>
2	Partai Golongan Karya	63.883	18,65%	Partai Amanat Nasional	53.028	16,18%
3	Partai Amanat Nasional	62.111	18,13%	Partai Keadilan Sejahtera	38.827	11,85%
4	Partai Demokrat	36.628	10,69%	Partai Golongan Karya	25.697	7,84%
5	Partai Persatuan Pembangunan	27.015	7,88%	Partai Hati Nurani Rakyat	13.270	4,05%
6	Partai Bulan Bintang	13.383	3,91%	Partai Persatuan Pembangunan	12.092	3,69%
7	PKPI	10.942	3,19%	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.601	3,24%
8	PDI Perjuangan	10.540	3,08%	Partai Bulan Bintang	8.454	2,58%
9	Partai Bintang Reformasi	5.559	1,62%	PKPI	6.822	2,08%
10	PKPB	5.060	1,48%	PDI Perjuangan	5.323	1,32%

*Sumber Data: KPUD Kota Padang dalam Padang Dalam Angka 2004 dan Padang Dalam Angka 2009*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemilu Legislatif pada tahun 2004 mayoritas perolehan suara diperoleh oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan suara sebesar 21,15% suara sedangkan pada pelaksanaan pemilu Legislatif tahun 2009 mayoritas perolehan suara diperoleh oleh Partai Demokrat dengan perolehan suara sebesar 36,22% suara di mana pada pemilu Legislatif tahun 2004 partai Demokrat hanya memperoleh

<sup>14</sup>BPS dan BAPPEDA Kota Padang, *Padang Dalam Angka 2004*, Padang, hal. 22.

<sup>15</sup>BPS dan BAPPEDA Kota Padang, *Padang Dalam Angka 2009*, Padang, hal. 24.

10,69% suara sedangkan perolehan suara PKS pada pemilu Legislatif tahun 2009 turun menjadi 11,85% suara.

Lebih lanjut peneliti juga melihat pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerahnya yang dilaksanakan pada tahun 2005 dan tahun 2010. Pada pemilukada Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 dimenangkan oleh pasangan Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman dengan perolehan suara sebesar 50,94% tingkat Kota Padang. Sedangkan pada pemilukada Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 dimenangkan oleh pasangan Irwan Prayitno dan Muslim Kasim dengan perolehan suara sebesar 30,77% tingkat Kota Padang di mana pada pemilukada tahun 2005nya Irwan Prayitno yang berpasangan dengan Ika Suma Hamid menerima kekalahan dengan persentase perolehan suara sebesar 30,60%. Sedangkan Marlis Rahman yang kembali mencalonkan diri dengan pasangannya Aristo Munandar pada pemilukada tahun 2010 hanya memperoleh suara sebesar 29,51%.

Pada tabel berikut ini disajikan hasil perolehan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 dan tahun 2010 tingkat Kota Padang.

**Tabel 1.2**  
**Hasil Perolehan Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 dan tahun 2010 Tingkat Kota Padang**

No Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2005	Partai Pendukung	Hasil Perolehan Suara	%	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010	Partai Pendukung	Hasil Perolehan Suara	%
1	<b>Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman</b>	<b>PDI-P PBB</b>	<b>144.931</b>	<b>50,94%</b>	<b>Irwan Prayitno dan Muslim Kasim</b>	<b>PKS Partai Hanura</b>	<b>90.330</b>	<b>30,77%</b>

2	Irwan Prayitno dan Ikasuma Hamid	PKS PBR	87.066	30,60%	Marlis Rahman dan Aristo Munandar	Partai Golkar	86.619	29,51%
3	Jefri Geovani dan Dasman Lanin	Koalisi Sakato (16 Partai Kecil)	33.893	11,91%	Fauzi Bahar dan Yohannes Dahlan	PAN PPP	64.255	21,89%
4	Leonardy Harmaini dan Rusdi Lubis	Partai Golkar	11.978	4,21%	Endang Irzal dan Asrul Syukur	P.Demokrat P.Gerindra	48.013	16,36%
5	M. Kapitra Ampera dan Dalimi Abdullah	PPP Partai Demokrat	6.633	2,33%	Ediwarman dan Husni Hadi	Koalisi Partai Maju Bersama	4.303	1,47%
	Jumlah Suara Sah		284.501				293.520	
	Suara Tidak Sah		23.333				6.941	

*Sumber Data: KPUD Kota Padang*

Adanya keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas pemilihan serta kesadaran dan pemahaman pemilih dalam suatu pemilu antara lain disebabkan orientasi pemilih yang dimiliki individu terhadap partai politik, calon anggota legislatif, ataupun calon gubernur dan wakil gubernur. Dilihat dari hasil pemilu legislatif maupun pilukada yang telah dilaksanakan di Kota Padang yang telah dijelaskan diatas dapat diasumsikan bahwa pada setiap pemilu legislatif tahun 2004 dan tahun 2009 serta pada pilukada yang dilangsungkan baik pada pilukada tahun 2005 dan pilukada tahun 2010 pemilih memiliki orientasi yang berubah. Hal ini mencerminkan bahwa pada setiap pemilu pemilih memiliki orientasi yang berbeda kepada setiap kandidat yang mengikuti pemilu yang tampak pada peningkatan suara dukungan pemilih maupun penurunan dukungan suara, yang memperlihatkan adanya perubahan orientasi politik pemilih yang cukup signifikan dalam memberikan dukungannya terhadap kandidat.

Dengan demikian berangkat dari adanya perubahan dukungan pemilih dalam pemilu sebagaimana dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pengaruh sosialisasi politik terhadap orientasi politik pemilih guru dan dosen di Kota Padang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mencoba mencari tahu dari mana pemahaman terhadap kehidupan politik dan keinginan masyarakat pemilih melakukan aktivitas politik dalam pemilu. Dalam hal ini peneliti melihat adanya kaitan antara sosialisasi politik melalui agen-agen politiknya dengan orientasi politik seseorang yang ternyata menjadi kunci pembentukan perilaku politik seseorang. Di mana sosialisasi politik tidak hanya menyangkut proses pembentukan sikap tapi juga mampu mengubah orientasi politik seseorang. Agar penelitian ini dapat terarah pada sasaran serta menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkungannya, maka perumusan masalah akan ditujukan pada agen sosialisasi politik yang menjadi pengaruh terhadap orientasi politik. Dari agen-agen yang ada, peneliti membatasi penelitian hanya pada sosialisasi politik melalui pekerjaan dan media massa untuk meninjau besarnya pengaruh kedua agen tersebut dalam proses sosialisasi politik.

Dalam penelitian ini pembahasan difokuskan kepada pekerjaan responden sebagai guru dan dosen. Di mana pekerjaan sebagai guru dan dosen menuntut adanya keterbukaan terhadap informasi yang bisa diperolehnya melalui media massa, baik media massa cetak ataupun elektronik dan tuntutan pekerjaan untuk profesi guru dan dosen yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Jadi, pekerjaan sebagai guru dan dosen merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian berstandar mutu atau norma tertentu. Sehingga pekerjaan sebagai guru dan dosen dituntut untuk menguasai secara mendalam bahan belajar atau mata pelajaran serta cara pembelajarannya, mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, menjadi partisipan aktif masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya, serta memiliki pengetahuan dan informasi yang luas.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Op.cit* Mudjia Rahardjo.

Sehingga agen sosialisasi politik media massa dan pekerjaan ini memiliki peranan yang penting dalam mengajarkan atau mentransmisikan pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap politik guru dan dosen. Maka berdasarkan hal di atas adapun perumusan masalah tersebut adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh dari sosialisasi politik melalui media massa terhadap orientasi politik guru dan dosen di Kota Padang?
2. Apakah terdapat pengaruh dari sosialisasi politik melalui pekerjaan terhadap orientasi politik guru dan dosen di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh sosialisasi politik melalui media massa dan pekerjaan terhadap orientasi politik pemilih yang berprofesi sebagai guru dan dosen di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa pengaruh sosialisasi politik melalui media massa dan pekerjaan terhadap orientasi politik pemilih yang berprofesi sebagai guru dan dosen di Kota Padang.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui dan memahami pengaruh sosialisasi politik terhadap orientasi politik di Sumatera Barat pada umumnya dan Kota Padang pada khususnya.
2. Secara sosial penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru serta evaluasi mengenai orientasi politik masyarakat.
3. Secara akademis dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan orientasi politik dan dapat menjadi salah satu literatur yang berguna bagi penelitian selanjutnya.